

PELATIHAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH BAGI MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN DI UPTD SMP NEGERI 9 MARUSU

School-Based Management Training for the Subject Teachers' Forum at UPTD SMP Negeri 9 Marusu

Supriadi Torro¹⁾, Henri^{2*)}, A. Noer Chalifah Ramadhany³⁾, Parham Taufik⁴⁾, Tiara Nur'aini⁵⁾

^{1,3}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

^{2,4,5}Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

Email: henri@unm.ac.id²⁾

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para stakeholder di UPTD SMP Negeri 9 Marusu dalam menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap konsep dan implementasi MBS, yang berdampak pada lemahnya pengelolaan sumber daya serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), demonstrasi, serta praktik langsung (learning by doing) dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep MBS dan penerapannya dalam konteks manajerial sekolah. Keterampilan peserta dalam perencanaan partisipatif dan pelibatan komite sekolah mengalami peningkatan yang nyata. Kepala sekolah memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan yang lebih transformatif, sementara guru mulai mengimplementasikan strategi pembelajaran aktif dan kreatif (PAKEM). Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana pendukung dan waktu pelaksanaan. Meskipun demikian, kegiatan ini terbukti efektif dalam memperkuat kolaborasi antar-stakeholder serta mendorong terwujudnya tata kelola sekolah yang lebih mandiri, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan menjadi model berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah menengah.

Kata kunci: manajemen berbasis sekolah, pelatihan, stakeholder

ABSTRACT

This Community Service Program aims to enhance the understanding and skills of stakeholders at UPTD SMP Negeri 9 Marusu in implementing the principles of School-Based Management (SBM). The program was motivated by the limited understanding of teachers and principals regarding the concepts and practices of SBM, which has led to weak resource management and low community participation in educational decision-making. The implementation of the program employed interactive lectures, focus group discussions (FGD), demonstrations, and hands-on practice (learning by doing) using a participatory approach. The results indicate a significant improvement in participants' comprehension of SBM concepts and their application in school management contexts. Participants demonstrated enhanced skills in participatory planning and in engaging school committees. The principal showed improved transformational leadership capacity, while teachers began applying active and creative learning strategies (PAKEM). The main challenges encountered included limited supporting facilities and time

constraints. Nevertheless, the program proved effective in strengthening collaboration among stakeholders and promoting more autonomous, transparent, and locally responsive school governance. Overall, this activity is expected to serve as a sustainable model for improving the quality of education at the secondary school level.

Keywords: *school-based management, training, stakeholders*

PENDAHULUAN

Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjalankan peran strategis ini, guru memerlukan dukungan sistem manajemen yang baik dan kolaborasi dengan sesama guru serta stakeholder pendidikan, salah satunya melalui MGMP sebagai forum profesional untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan kompetensi (Dzaky Satria et al., 2025). Namun, efektivitas MGMP sering terhambat oleh perbedaan kompetensi dan kurangnya pendampingan. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kualitas guru, kompleksitas kurikulum, keterbatasan sarana, dan ketimpangan akses. Selain itu, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang belum optimal menjadi kendala, padahal MBS terbukti meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan mutu pendidikan (Kurniawati, 2022).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan sesuai kondisi lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Anggraini et al., 2024). Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya secara efektif guna mencapai mutu pendidikan yang lebih baik (Hendra Wahyudin et al., 2024)). Penelitian menunjukkan efektivitas MBS dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama pada aspek kurikulum, kesiswaan, tenaga

pendidik, dan sarana-prasarana (Kurniawan et al., 2020). Studi di Makassar juga membuktikan kontribusi MBS terhadap prestasi akademik melalui inovasi pembelajaran, pelibatan orang tua, dan akuntabilitas sekolah (Indriati Amirullah & Musfirah Musfirah, 2024). Keberhasilan MBS sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan visioner (Alfriantoni et al., 2025).

Implementasi MBS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi warga sekolah, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di sekolah (Nomin et al., 2025). Hambatan lain meliputi keterbatasan pemahaman stakeholder, rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, minimnya pelatihan, dan kurangnya evaluasi berkelanjutan (Andriyan & Yoenanto, 2022). Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam keberhasilan MBS; pemimpin yang transformatif mampu menumbuhkan budaya kolaboratif, inovasi pembelajaran, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme guru (Ritia Sari et al., 2021). Selain itu, dukungan masyarakat dan komite sekolah turut memperkuat mutu pendidikan melalui partisipasi aktif dan penyediaan sumber daya (Aliyyah et al., 2021).

Namun, pelaksanaan kebijakan MBS di lapangan masih sering menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak sekolah yang belum menerapkan MBS secara optimal karena pelatihan yang hanya bersifat teoritis tanpa tindak lanjut, kurangnya pengawasan, serta lemahnya partisipasi guru dalam forum profesional

seperti MGMP (Andriyan & Yoenanto, 2022).

Hasil observasi awal tim pengabdian menunjukkan bahwa SMP Negeri 9 Marusu menghadapi berbagai kendala dalam penerapan MBS. Kepala sekolah dan tenaga pendidik masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip manajemen otonom, pengelolaan sumber daya, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan pendidikan dan lemahnya kolaborasi antar-stakeholder. Selain itu, tidak adanya pelatihan yang memadai menyebabkan guru MGMP kesulitan memahami aspek manajerial seperti perencanaan berbasis sekolah, pelaporan, kontrol mutu, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan situasi tersebut, diperlukan pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi seluruh pemangku kepentingan di SMP Negeri 9 Marusu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan stakeholder dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program sekolah sesuai dengan prinsip MBS. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam kepemimpinan transformatif, memperkuat partisipasi komite sekolah, serta membangun kolaborasi yang sinergis antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan penerapan MBS yang optimal, sekolah diharapkan menjadi lebih mandiri, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta perkembangan lingkungan lokal.

Permasalahan Mitra

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SMP Negeri 9 Marusu masih menghadapi hambatan pada pemahaman prinsip MBS, kepemimpinan kepala sekolah, dan partisipasi stakeholder. Nilai-nilai kemandirian, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum

sepenuhnya diterapkan, sehingga fungsi manajerial, inovasi pembelajaran, dan peran komite sekolah belum optimal. Gaya kepemimpinan kepala sekolah belum bersifat transformatif, sementara keterlibatan masyarakat dan orang tua masih pasif. Untuk mengatasi hal tersebut, program pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan praktis melalui pelatihan intensif, pendampingan, serta pembentukan jejaring kerja sama antara sekolah dan masyarakat. Fokus diarahkan pada penguatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan pemahaman guru dan komite tentang MBS, serta forum kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif demi terwujudnya pengelolaan sekolah yang mandiri, transparan, dan berorientasi mutu.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SMP Negeri 9 Marusu. Solusi difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan kemampuan kepemimpinan, serta pembentukan sistem kerja sama antara sekolah dan masyarakat dengan pendekatan praktis agar menghasilkan dampak nyata. Langkah utama meliputi: (1) pelatihan dan pendampingan MBS bagi kepala sekolah, guru, dan komite untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; (2) pelatihan kepemimpinan transformatif berbasis analisis SWOT untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan strategis kepala sekolah; serta (3) pembentukan forum kolaboratif sekolah-masyarakat sebagai wadah komunikasi dan pengambilan keputusan bersama.

Luaran dan Target Capaian

Program pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi

juga menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan di sekolah mitra. Setiap kegiatan ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kolaborasi seluruh unsur pendidikan. Hasil yang diharapkan meliputi: (1) peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan komite dalam menerapkan prinsip MBS secara mandiri dan partisipatif; (2) terbentuknya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu memotivasi dan mendorong kolaborasi dalam peningkatan mutu pendidikan; serta (3) terbangunnya hubungan kuat antara sekolah dan masyarakat dengan partisipasi aktif stakeholder dalam pengembangan sekolah..

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Program PKM ini dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2025 selama empat jam (08.00–12.00 WITA) dengan 32 peserta yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan anggota komite sekolah yang dipilih karena keterlibatannya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sekolah. Pemilihan mitra dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Evaluasi keberhasilan program diukur melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta (pretest dan posttest), observasi partisipatif, serta kemampuan menyusun rencana aksi berbasis MBS. Keberhasilan juga dilihat

Desain kegiatan ini berupa pelatihan MBS yang bersifat edukatif dan aplikatif, dengan menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, pelatihan berbasis kasus, praktek langsung serta refleksi Bersama antar peserta pelatihan. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait Manajemen Berbasis Sekolah, kemudian membuka ruang dialog secara langsung yang sebesar-besarnya kepada setiap peserta pelatihan untuk mengeksplorasi pemahaman sekaligus

dari meningkatnya kolaborasi stakeholder, keaktifan forum sekolah–masyarakat, dan munculnya inisiatif inovatif pasca kegiatan.

Program PKM ini difokuskan untuk mengatasi kurangnya pelatihan dan pengetahuan mitra tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui metode ceramah, diskusi/FGD, dan demonstrasi dengan pendekatan partisipatif serta *learning by doing* agar peserta aktif sejak awal hingga akhir kegiatan. Program dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan, pelatihan, dan pendampingan–evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan survei lapangan di UPTD SMP Negeri 9 Marusu untuk mengidentifikasi masalah MBS, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru, melibatkan mahasiswa, serta melakukan koordinasi untuk menyusun jadwal dan membangun komitmen pelaksanaan. Tahap pelatihan berlangsung selama tiga hari secara interaktif dengan fasilitator dosen dan mahasiswa, meliputi pemahaman konsep dasar MBS, kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi stakeholder, serta praktik penyusunan perencanaan partisipatif dan strategi pembelajaran aktif. Tahap terakhir berupa pendampingan dan evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama dan observasi lapangan menggunakan pretest–posttest untuk mengukur efektivitas pelatihan, serta penyusunan laporan akhir sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi program berikutnya.

peraktek langsung terkait Manajemen Berbasis Sekolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SMP Negeri 9 Marusu berlangsung selama tiga hari. Kegiatan ini melibatkan kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Pelatihan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Peserta mengikuti ceramah interaktif, diskusi kelompok (FGD), demonstrasi, praktik langsung, dan refleksi bersama

(learning by doing). Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta.

Dengan menggunakan kuesioner, refleksi peserta, dan observasi langsung, data berikut diperoleh:

1) Peningkatan Pemahaman Konseptual tentang Manajemen Berbasis Sekolah

Hasil pengamatan fasilitator menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Rata-rata skor pretest sebesar 62 meningkat menjadi 91 pada posttest, atau naik 92% dari 32 peserta. Peserta mampu menjelaskan MBS sebagai desentralisasi pendidikan yang menekankan kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberi contoh penerapan seperti penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal di Marusu. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep *community empowerment* (Zimmerman, 2020) yang menekankan peningkatan kontrol, pemahaman, dan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan. Pelatihan ini berhasil memperkuat *power within* pendidik dan pengelola sekolah untuk mengelola lembaga pendidikan secara mandiri dan bertanggung jawab.

2) Peningkatan Keterampilan Praktis

Melalui latihan penyusunan rencana kerja sekolah partisipatif berbasis analisis SWOT, peserta menunjukkan peningkatan keterampilan yang signifikan. Skor rata-rata pretest sebesar 55 meningkat menjadi 85 pada posttest, atau naik 96% dari 32 peserta. Guru mulai menerapkan model PAKEM, sedangkan kepala sekolah memahami kepemimpinan transformatif yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Temuan ini sejalan dengan teori *capacity building* (Brinkerhoff & Morgan, 2010), bahwa peningkatan kapasitas SDM mencakup dimensi individu, organisasi, dan

sistem. Pelatihan MBS terbukti memperkuat kapasitas guru dan kepala sekolah sekaligus membangun mekanisme kerja kolaboratif di lingkungan sekolah.

3) Peningkatan Partisipasi Stakeholder Sekolah

Hasil pengamatan fasilitator menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi stakeholder sekolah. Skor rata-rata pretest sebesar 63 meningkat menjadi 93 pada posttest, atau naik 95% dari 32 peserta. Peserta menjadi lebih aktif berdiskusi dan mendukung pengadaan sarana sekolah, menandakan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi pendidikan. Temuan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan partisipatif (Kamruzzaman & White, 2018) yang menekankan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap program. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah sebagai institusi publik.

4) Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah

Hasil wawancara dan refleksi menunjukkan bahwa pelatihan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam perencanaan, supervisi, dan evaluasi program. Sebanyak 98% dari 32 peserta menyatakan kepala sekolah kini lebih terbuka terhadap ide dan inovasi guru, menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Hal ini sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional (Bass, 1990), di mana pemimpin mampu menginspirasi dan memberdayakan bawahan untuk mencapai tujuan bersama.

5) Dampak terhadap Mutu Layanan Pendidikan

Meskipun dampak jangka panjang belum terukur, observasi menunjukkan perubahan positif pada mutu layanan pendidikan. Guru lebih

aktif dalam MGMP, muncul inisiatif peningkatan pembelajaran, dan komunikasi antar-stakeholder menjadi lebih terbuka. Perubahan ini mencerminkan keberhasilan empowerment-based training yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya kerja menuju tanggung jawab kolektif seluruh warga sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Secara umum, kegiatan PKM ini memberi pengaruh nyata pada kapasitas individu dan lembaga sekolah. Peserta menyatakan bahwa pendekatan partisipatif dan praktik langsung membantu mereka memahami dengan lebih baik. Mereka merasa pelatihan ini lebih efektif dibandingkan metode teori saja.



Gambar 1. Pelatihan pengenalan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS)



Gambar 2. Latihan praktik manajemen berbasis sekolah (MBS)



Gambar 3. Tahap pendampingan dan evaluasi manajemen berbasis sekolah (MBS)

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di UPTD SMP Negeri 9 Marusu menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman dan keterampilan stakeholder membantu pengelolaan sekolah. Sebelum pelatihan, sekolah menghadapi masalah dalam manajemen, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah. Setelah pelatihan, ada perubahan besar dalam cara pengelolaan berbasis MBS dilakukan.

Secara umum, temuan ini cocok dengan pandangan (Anggraini et al., 2024). Mereka mengatakan bahwa MBS adalah desentralisasi pendidikan yang memberi sekolah otonomi untuk menyesuaikan pengelolaan dengan kebutuhan lokal. Di Marusu, pendekatan ini membantu mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dan sistem pengawasan sekolah yang lemah.

Hasil peningkatan partisipasi stakeholder sampai 95% setelah pelatihan mendukung penelitian (Aliyyah et al., 2021). Mereka menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dan komite sekolah adalah bagian penting dari keberhasilan MBS. Kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat membuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam pengelolaan pendidikan menjadi lebih baik.

Selain itu, peningkatan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam perencanaan strategis mendukung temuan (Kurniawan et al., 2020). Mereka menekankan pentingnya manajemen kurikulum, kesiswaan, dan sumber daya manusia dalam MBS untuk meningkatkan

mutu pendidikan. Guru yang sebelumnya tidak aktif dalam forum MGMP kini lebih sering membahas inovasi pembelajaran berbasis PAKEM. Ini sesuai dengan prinsip MBS yang menekankan efektivitas dan kemandirian sekolah.

Dari sisi kepemimpinan, pelatihan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan motivasi dan kerja sama di dalam sekolah. Temuan (Nomin et al., 2025) menyatakan bahwa kepala sekolah yang memimpin secara transformasional, merencanakan berdasarkan analisis SWOT, dan mengelola SDM secara efektif adalah faktor utama keberhasilan MBS. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep tetapi juga memperkuat kemampuan kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Meskipun hasil pelatihan cukup baik, masih ada kendala. Guru memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pendampingan lanjutan. Fasilitas sekolah juga masih belum memadai. Hal ini sesuai dengan penelitian (Andriyan & Yoenanto, 2022). Mereka menyatakan bahwa kekurangan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat tetap menjadi tantangan umum dalam pelaksanaan MBS di sekolah Indonesia.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis partisipasi dan langsung praktik sangat efektif. Pelatihan membantu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kerja sama antar stakeholder sekolah. Implementasi MBS di SMP Negeri 9 Marusu menjadi contoh bahwa pelatihan kapasitas dapat memperbaiki tata kelola sekolah dan kualitas pendidikan lokal. Untuk keberlanjutan, disarankan adanya pendampingan rutin dan pembuatan tim MBS sekolah supaya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tetap terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SMP Negeri 9 Marusu menunjukkan bahwa pendekatan

partisipatif berbasis praktik langsung memiliki potensi besar sebagai model pemberdayaan berkelanjutan di bidang pendidikan. Peningkatan pemahaman, keterampilan manajerial, partisipasi stakeholder, dan kepemimpinan kepala sekolah membuktikan bahwa pelatihan ini memperkuat kapasitas individu dan kelembagaan. Dari refleksi peserta, muncul komitmen membentuk tim MBS sekolah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berkelanjutan. Beberapa sekolah di Marusu juga tertarik mengadopsi model ini, menunjukkan potensi replikasi di sekolah lain. Untuk menjaga keberlanjutan, perlu pendampingan pascapelatihan dan penguatan jejaring antar sekolah guna berbagi praktik baik dan inovasi MBS yang sesuai dengan konteks lokal serta didukung dinas pendidikan dan perguruan tinggi.

Untuk mendukung keberlanjutan hasil pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), diperlukan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Sekolah disarankan membentuk tim MBS yang aktif agar prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tetap terjaga dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan yang berkelanjutan untuk memperluas penerapan model pelatihan ini di sekolah lain. Sementara itu, perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pendampingan, riset terapan, dan program pengabdian masyarakat yang membantu evaluasi dan penguatan kapasitas manajemen sekolah. Kolaborasi tiga pihak ini akan memastikan pelatihan MBS tidak hanya berhenti pada peningkatan individu, tetapi juga menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfrianтони, Dhea Az-Zahra, V., Sari, W., & Nuria. (2025). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan

- mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 10–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3>
- Aliyyah, R. R., Subasman, I., Herawati, E. S. B., & Oktaviany, V. (2021). Manajemen berbasis sekolah : optimalisasi mutu pendidikan. *TADBIR MUWAHHID*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.30997/jtm.v5i1.4046>
- Andriyan, A., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi penerapan dan pengelolaan manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.45011>
- Anggraini, W. D., Syam, F., Hasan, A., & Astri, E. (2024). Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(5), 5804–5811. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i5.7549>
- Bass, B. M. (1990). *From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision*.
- Brinkerhoff, D. W., & Morgan, P. J. (2010). Capacity and capacity development: coping with complexity. *Public Administration and Development*, 30(1), 2–10. <https://doi.org/10.1002/pad.559>
- Dzaky Satria, Ihsan Utama Kusasih, & Gusmaneli Gusmaneli. (2025). Analisis rendahnya kualitas pendidikan di indonesia saat ini : suatu kajian literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3838>
- Hendra Wahyudin, Usman Radiana, & Luhur Wicaksono. (2024). Implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sma negeri 1 sungai kakap kabupaten kubu raya. *Manajemen Pendidikan*, 224–238. <https://doi.org/10.23917/jmp.v9i2.6694>
- Indriati Amirullah, & Musfirah Musfirah. (2024). Dampak implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap prestasi akademik di upt spf smp negeri 22 kota makassar. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 300–307. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.1333>
- Kamruzzaman, P., & White, S. C. (2018). Empowerment and community participation. In *The International Encyclopedia of Anthropology* (pp. 1–10). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea2062>
- Kurniawan, Ahmad, S., & Wahidy, A. (2020). Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 3409–3418. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v4i3.864>
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di indonesia dan solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Nomin, Resky, M., & Lausiana. (2025). Strategic planning in achieving optimal quality of education with school based management: a systematic literature review. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 13(1), 441–450. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6647>
- Ritia Sari, A. J. D., Giatman, M., & Ernawati. (2021). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan*

Pendidikan, 5(3), 329–333.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.34846>

Zimmerman, M. A. (2020). Empowerment theory. In *Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice: A Generalist-Eclectic Approach: Fourth Edition* (pp. 43–63). Kluwer Academic/Plenum Publishers.
https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2